

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KREDIT PADA PT. BANK RIAU KANTOR CABANG
PASAR PUSAT PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*



OLEH

R. MUHAMMAD KAUSAR
NIM. 10573002122

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KREDIT PADA PT. BANK RIAU KANTOR CABANG PASAR PUSAT PEKANBARU

Oleh : R. Muhammad Kausar

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Plaza Sukaramai Lantai 1 Blok A No. 04, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan kredit pada bank ini telah berjalan efektif dan efisien.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara langsung dengan pegawai bank yang terkait serta dokumentasi yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisa dengan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan keadaan di lapangan atau hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan guna untuk memperoleh hasil yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif yang diterapkan bank, khususnya terhadap kredit bank.

Kemudian dari analisa data tersebut ditemukan beberapa masalah, diantaranya penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Bank Indonesia, tidak adanya pemantauan ke lapangan setelah kredit dicairkan guna mendeteksi gejala dini terhadap kredit bermasalah, serta tidak adanya bagian khusus pada struktur organisasi yang menangani penagihan kredit macet.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan, disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan kredit pada PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien.

Kata kunci : Sistem pengendalian intern terhadap kredit

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metodologi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TELAAH PUSTAKA	14
A. Pengendalian Intern	14
1. Pengertian Pengendalian Intern	14
2. Komponen Pengendalian Intern	15
3. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern	18
4. Efektifitas dan Efisiensi	19
B. Bank	23
1. Pengertian Bank	23
2. Fungsi Bank	24

3. Jenis-jenis Bank	25
C. Kredit	26
1. Pengertian Kredit	26
2. Unsur-unsur Kredit	27
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	28
4. Jenis-jenis Kredit	30
5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	33
6. Prosedur Pemberian Kredit	37
7. Teknik Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet	38
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	42
A. Sejarah Singkat Perusahaan	42
B. Struktur Organisasi	43
C. Aktivitas Perusahaan	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Tujuan Kepatuhan	59
B. Aktivitas/Prosedur Pengendalian	62
C. Struktur Organisasi	65
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pepatah melayu mengatakan bahwa “*semai ilalang tumbuhnya padi.*” Begitulah perumpamaan yang dapat digambarkan terhadap negara Indonesia khususnya di Riau, yang kononnya merupakan daerah yang kaya akan berbagai potensi dan sumber daya alam.

Hal ini tentunya menuntut banyak pihak untuk bersaing dalam mengelola potensi yang ada tersebut, dengan tujuan agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat. Penanganan sumber daya yang ada tersebut tentunya membutuhkan berbagai potensi pula, baik dari segi *skill* maupun modal. Dalam hal ini, modal tentunya sangat berperan penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Banyak orang yang berorientasi untuk sukses dan ingin mendapatkan kesejahteraan hidup dengan cara mengelola sumber daya yang ada yang tersedia dari alam, namun begitu banyak pula yang gagal untuk mencapai tujuan utamanya. Dan kebanyakan diantara mereka karena disebabkan oleh beberapa faktor tentunya, yang salah satunya adalah kekurangan modal yang dibutuhkan.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, perbankan hadir untuk program tersebut. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia umumnya pada saat ini menunjukkan dampak positif bagi masyarakat dalam hal perekonomian. Ini bisa kita lihat dari tingginya tingkat persaingan dan pertumbuhan disektor perbankan tersebut, yakni dengan makin banyaknya muncul cabang dari berbagai

bank disetiap daerah. Perkembangan tersebut tentunya karena tingkat laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap lembaga perbankan tersebut meningkat, sehingga memicu para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menanamkan modal mereka disektor perbankan ini khususnya.

Perbankan dalam hal perekonomian khususnya di Indonesia mempunyai nilai strategis dalam menentukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena lembaga perbankan dimaksudkan adalah sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dan dalam hal ini, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa.

Bank dalam kegiatan usahanya menerima dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana yang diterimanya tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan merupakan kegiatan utama bank, karena unsur pendapatan bunga dari kredit merupakan unsur yang paling pokok dan dominan agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga kelangsungan usaha perbankan dapat terus ditingkatkan dan kegiatan perekonomian juga dapat meningkat.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, (SAK:2004:31:11).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, (Sigit Triandu:2006:114).

Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, tentunya mengandung resiko, karena kredit mudah diselewengkan dan disalahgunakan. Untuk itu, penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah oleh pihak bank membutuhkan adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali, sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar diberikan kepada nasabah yang dapat dipercaya untuk melunasinya tepat waktu. Jadi, untuk dapat mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank, maka sangat diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik. Dimana sistem tersebut dikenal dengan sistem pengendalian intern.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2004:319:2) menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan manajemen lain entitas yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu, a) Keandalan pelaporan keuangan, b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, pengendalian intern ini terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian,
- b. Penaksiran resiko,
- c. Aktivitas pengendalian,
- d. Pemantauan, dan
- e. Informasi dan komunikasi”.

Berdasarkan pedoman standar sistem pengendalian intern bank umum tahun 2003 (Bank Indonesia: www.bi.go.id:2009) menyatakan bahwa, sistem pengendalian intern bank merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna a) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, b) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, d) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, dan e) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Sedangkan tujuan dari sistem pengendalian itu sendiri salah satunya adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru merupakan bagian integral dari lembaga perbankan di Indonesia, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank ini menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan dan jasa maupun dalam bidang pertanian dan sektor lainnya. Kredit yang disalurkan tersebut tentunya tidak lepas dari resiko-resiko yang akan terjadi, seperti tingginya kemungkinan tidak dilunasinya kredit tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen Bank tentunya harus melakukan pengendalian kredit yang efektif agar resiko tersebut dapat diatasi dan diminimalisir, sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan.

Faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam mengurangi resiko tidak dilunasinya kredit, maka jaminan pemberian kredit yang telah disepakati oleh pihak Bank dan debitur sangat diperlukan, dengan tujuan agar pihak debitur mempunyai semacam motivasi untuk melunasi pinjaman tersebut yakni dengan menebus kembali agunan yang telah diserahkannya kepada bank.

Karena dalam pemberian kredit mengandung risiko, Warman (2006:106) Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui analisis 5 C, yaitu *character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi).

Dari data kualitas kredit yang penulis peroleh, bahwa kredit yang dinyatakan macet pada tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Daftar Kualitas Kredit pada PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat

No.	Kolektibility	Tahun 2007		Tahun 2006	
		Baki Debet (Rp)	Persentase	Baki Debet (Rp)	Persentase
1	Lancar	388.450.205.000,00	98,14	277.708.210.000,00	98,65
2	D.P. Khusus	2.318.641.000,00	0,59	1.735.877.000,00	0,62
3	Kurang Lancar	701.043.000,00	0,18	311.799.000,00	0,11
4	Diragukan	1.030.900.000,00	0,26	476.462.000,00	0,17
5	Macet	3.295.926.000,00	0,83	1.284.392.000,00	0,46
Total		395.796.715.000,00	100	281.516.740.000,00	100

Sumber : PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa kredit yang dinyatakan macet oleh Bank Riau Cabang Pasar Pusat pada tahun 2007 sebesar Rp 3.295.926.000,00 dan jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun 2006 yang jumlahnya sebesar Rp 1.284.392.000,00. Dan hal tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis, sehingga berdasarkan penelusuran lebih lanjut didapati beberapa masalah yang menurut penulis berhubungan dengan peningkatan kredit macet tersebut, diantaranya :

1. Bank Indonesia (www.bi.go.id:2009) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum) selaku pengawas perbankan di Indonesia menyatakan bahwa :

“Batas maksimum pemberian kredit adalah sebesar 80% (delapan puluh peratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan yang berupa tanah, bangunan dan rumah yang bersertifikat hak milik (SHM), dan sebesar 50% (lima puluh peratus) dari nilai pasar untuk agunan yang berupa kendaraan bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dalam hal ini, penyaluran kredit kredit yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Pasar Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam penyaluran kredit komersil, ditemukan beberapa nasabah yang melakukan pinjaman dengan nilai agunan lebih kecil dibandingkan plafon kredit yang diberikan oleh bank, diantaranya pada tahun 2007 plafon kredit yang diberikan oleh Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru kepada PT. PRB adalah sebesar Rp. 1.400.000.000,- sedangkan nilai agunan untuk kredit tersebut tersebut hanya sebesar Rp. 1.187.120.000,-. Selain itu, pada tahun 2006 plafon kredit untuk PT. AMI adalah sebesar Rp. 3.435.000.000,-, sedangkan agunan yang dijamin oleh debitur ke bank adalah sebesar Rp. 2.711.000.000,-. Kemudian pada tahun 2005 dengan nilai agunan yang diserahkan oleh CV. AU sebesar Rp. 375.225.000,-, perusahaan tersebut dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan total plafon kredit sebesar Rp. 425.000.000,-.

Dari ketiga temuan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, apabila terjadi kemacetan terhadap pelunasan kredit oleh debitur, maka keadaan ini sangat berpotensi dapat merugikan bank, karena nilai agunan tidak mengcover

plafon kredit tersebut. Hal ini terjadi karena pihak nasabah mempunyai hubungan yang istimewa dengan pegawai bank.

Berkaitan dengan sistem pengendalian intern, maka dalam hal ini pihak perbankan tidak sepenuhnya menjalankan salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern perbankan yakni “kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku,” karena telah mengabaikan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Aktivitas/prosedur pengendalian bertujuan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Salah satu langkah awal untuk mendeteksi apakah kredit yang disalurkan oleh bank tidak menghadapi kendala dalam pelunasannya, maka bank harus membuat laporan yang akurat mengenai perkembangan kredit yakni dengan melakukan pemantauan kelapangan oleh bagian analis kredit.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bagian analis kredit bank, yakni dengan pertanyaan : “Setelah kredit dicairkan, bank tentunya harus membuat laporan perkembangan kredit. Bagaimana langkah-langkah Bank Riau ini dalam menyiapkan laporan tersebut ?”

Dalam hal ini, bagian analis kredit membuat laporan perkembangan kredit yang disalurkan hanya berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dimana apabila debitur membayar kreditnya tepat pada tanggal jatuh tempo maka bagian analis membuat laporan bahwa kredit yang disalurkan tersebut tidak bermasalah tanpa harus melakukan pemantauan

secara langsung ke lapangan. Hal ini menyebabkan tidak adanya laporan hasil pemantauan (*monitoring*) yang benar-benar akurat yang dibuat oleh bagian analis kredit dan tentunya PT. Bank Riau juga tidak segera mengetahui perkembangan kredit yang diterima oleh debitur secara akurat. Khusus bagi debitur yang mengalami masalah terhadap usahanya, hal ini juga dapat menyebabkan tidak adanya solusi yang ditawarkan oleh pihak bank untuk menangani masalah yang sedang dihadapi oleh debitur sehingga masalah tersebut dapat mengakibatkan pelunasan pinjaman oleh debitur menjadi tidak lancar dan bahkan macet.

3. Di dalam lingkungan pengendalian, struktur organisasi merupakan satuan usaha yang bertujuan untuk membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada. Dalam hal ini pada struktur organisasi Bank (lihat lampiran) tidak terdapat bagian khusus yang menangani penagihan kredit (*debt collector*), sehingga yang melakukan penagihan tersebut adalah bagian analis kredit. Hal ini menyebabkan terjadinya rangkap jabatan/pekerjaan yang dilakukan oleh bagian analis kredit, sehingga dapat pula menyebabkan kinerja pegawai tidak maksimal seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah serta untuk mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil judul :

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kredit Pada PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah pengelolaan kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru telah berjalan efektif dan efisien ?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

“Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern terhadap kredit macet pada PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat telah efektif dan efisien.”

2. Manfaat penelitian :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana sistem pengendalian intern terhadap kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru.
- b. Bagi perusahaan, untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan/atau pertimbangan dalam menerapkan sistem pengendalian intern terhadap kredit. Ini sangat penting karena kinerja bank yang bagus akan memelihara dan membangun kepercayaan dan loyalitas yang besar dari para nasabah. Selain itu, adanya pengelolaan kredit yang efektif diharapkan menghindari terjadinya kredit bermasalah yang bisa menjadi faktor penghambat bagi bank untuk memperoleh laba yang maksimal. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan

dapat diketahui bagaimana mengelola kredit yang efektif pada PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat.

- c. Bagi pembaca, sebagai bahan perbandingan dan/atau referensi untuk penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama di masa akan datang.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat, Jalan Jendral Sudirman, Plaza Sukaramai Lantai 1 Blok A No. 04, Pekanbaru.

2. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf perusahaan yang berwenang yakni dalam bentuk yang belum jadi dan masih memerlukan pengolahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi yang berupa, neraca, laporan laba rugi, jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, struktur organisasi, dan sejarah singkat perusahaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data untuk penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait, dimana wawancara ini penulis lakukan dalam hal untuk mendukung data primer.
- b. Dokumentasi, yaitu data-data yang penulis peroleh langsung dari divisi keuangan dan divisi analis kredit, divisi umum, serta dari auditor cabang pada PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, seperti laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi), jenis kredit yang disalurkan, kualitas kredit yang disalurkan, laporan penyaluran kredit (daftar plafond kredit dan jumlah agunan), prosedur pemberian kredit, struktur organisasi, dan sejarah singkat perusahaan.

4. Analisis Data

Dengan tujuan untuk dapat menemukan gambaran tentang permasalahan yang diteliti, penulis menganalisa data secara *deskriptif*, yaitu dengan cara membandingkan data dan fakta yang ada dengan berbagai teori-teori yang mendukung permasalahan yang diteliti, guna menyimpulkan dan menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam lima bab. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan pengendalian intern, komponen pengendalian intern, keterbatasan pengendalian intern, efektifitas dan efisiensi, pengertian bank, fungsi bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, prosedur pemberian kredit, kredit macet, penyelesaian dan penyelamatan kredit macet.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini diuraikan gambaran umum objek penelitian yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta aktivitas perusahaan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem pengendalian intern terhadap kredit serta perbandingan antara teori dengan prakteknya pada perusahaan tersebut.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dan diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengendalian Intern

Menurut Sugiarto (2002:81) mengatakan bahwa, “sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.”

1. Pengertian pengendalian intern

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2004:319:2) menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan manajemen lain entitas yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. Keandalan pelaporan keuangan,
- b. Efektifitas dan efisiensi operasi, dan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku”.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Sukirno Agoes (2000:57) yang mengatakan bahwa pengendalian intern adalah “kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan yang spesifik akan dapat tercapai.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu perusahaan sangat menunjang kinerja perusahaan itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Selain itu juga dapat diketahui bahwa

pengendalian menjamin kebijaksanaan dan pengarahan-pengarahan manajemen dan penilaian karyawan secara pribadi itu tidak mungkin untuk mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan-tujuannya dan untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Struktur pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan yang efektif.

2. Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern mempunyai lima komponen utama yang saling terkait, yang terdiri dari ; a) lingkungan pengendalian, b) penilaian resiko, c) prosedur pengendalian, d) pemantauan, dan e) informasi dan komunikasi.

a. Lingkungan pengendalian

Menurut Jusuf (2003:261) lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- 1) Integritas dan nilai etika
Integritas dan nilai etika ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
Dalam hal ini lebih ditekankan terhadap pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dan pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.
- 3) Falsafat dan gaya operasi manajemen
Pada bagian ini, mencakup bagaimana sikap manajemen terhadap pengendalian perusahaan agar terciptanya lingkungan yang baik. Dengan falsafah dan gaya operasi dalam penerapan yang dilakukan manajemen, diharapkan hubungan kerja dapat terkendali.
- 4) Struktur organisasi
Ini merupakan satuan usaha yang bertujuan untuk membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada.

- 5) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit
Di sini dijelaskan bahwa dewan komisaris dan komite audit merupakan pihak independen dari manajemen dan anggota-anggotanya yang aktif dan menilai aktivitas manajemen.
- 6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
Dalam hal ini dijelaskan bahwa, pemberian wewenang dan tanggungjawab di atas meliputi pengendalian terhadap pemberian wewenang seperti memo dari manajemen.
- 7) Kebijakan dan prosedur kepegawaian.
Di sini dijelaskan bahwa jika pegawai kompeten dan dapat dipercaya, maka pengendalian lain boleh tidak ada laporan keuangan yang andal yang akan dihasilkan.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko ini merupakan langkah yang diambil manajemen untuk menghadapi resiko yang kemungkinan akan terjadi pada setiap tindakan yang dilakukan perusahaan, karena setiap kegiatan yang dilakukan tersebut tentunya mempunyai berbagai resiko yang harus dihadapi, baik itu kecil maupun besar.

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank (Bank Indonesia: www.bi.go.id:2009).

Menurut Jusuf (2003:263) penetapan resiko yang dilakukan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko-resiko yang relevan terhadap penyimpangan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penaksiran resiko merupakan identifikasi, analisis manajemen terhadap resiko yang relevan

dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan.

c. Prosedur Pengendalian.

Prosedur pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan.

d. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan (Munawir:1999:228)

Penilaian khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern.

e. Informasi dan komunikasi

Menurut Zaki Baridwan (1998:13), informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen untuk dijadikan sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan oleh pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, seperti hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

3. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Bank Indonesia dalam pedoman standar sistem pengendalian intern bank umum Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank, antara lain:

- a. kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus Bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi
- b. kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank;
- c. tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional Bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas *risk exposure* dan kinerja Bank;
- d. kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas *risk exposure* dan penerapan tindakan perbaikan;
- e. kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
- f. kurangnya komitmen manajemen Bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank. (www.bi.go.id:2003)

Menurut Mulyadi (2001:86) Struktur pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan sehingga hanya memberikan keyakinan memadai,

bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut adalah keterbatasan bawaan yang melekat setiap struktur pengendalian intern :

- a. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
- b. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena lalai tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
- c. Kolusi
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi, ini dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian intern yang dirancang.
- d. Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.
- e. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara

mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*.

Berdasarkan pedoman standar sistem pengendalian intern bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa :

“Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.”

“Sistem Pengendalian Intern yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti Akuntan Publik.”

“Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya resiko (*risk culture*) yang efektif pada organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan”, (Bank Indonesia: www.bi.go.id:2003).

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono:1999:27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are

unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not". (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak)."

Disamping itu, menurut Chester I. Barnard, dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono:1999:28), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan system kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut :

"Effectiveness of cooperative effort relates to accomplishment of an objective of the system and it is determined with a view to the system's requirement. The efficiency of a cooperative system is the resultant of the efficiency of the individuals furnishing the constituent effort, that is, as viewed by them". (Efektifitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu system (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu)."

Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto:2002:139), menyatakan :

“Doing the right things is more important than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right” (efektifitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly” (efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).”

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau sering dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya.

Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan, sedangkan

efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

B. Bank

1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Defenisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Walaupun ada perbedaannya hanya tampak pada tugas usaha bank tersebut. Ada yang mendefenisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan defenisi lainnya mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Kasmir (2003:23), yang dimaksud dengan bank adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Karena erat kaitannya antara bank dan uang maka bank disebut juga lembaga yang berjualan uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian uang yang terkumpul tersebut selanjutnya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit.

2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik, bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*, (Sigit Triandu:2006:9)

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanannya akan dapat ditarik kembali dari bank.

Sementara pihak bank akan mau menempatkan atau menyalurkan dannya sendiri kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Baik kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tersebut, semuanya tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang (transfer), penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dari ketiga fungsi bank di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).

3. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 juga dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu juga dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan diseluruh wilayah.

- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

C. Kredit

1. Pengertian kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah merupakan kata yang asing dalam masyarakat kita. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, Sigit Triandus (2006:114), kredit didefinisikan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita (2001:6), yang mengemukakan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah suatu pemberian prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.”

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa Latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksudnya bagi pemberi

kredit adalah ia percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

2. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:94), adalah sebagai berikut :

- a. **Kepercayaan**
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b. **Kesepakatan**
Disamping unsure percaya didalam kredit juga memandang unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. **Jangka waktu**
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang.
- d. **Resiko**
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya /macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar pula resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.
- e. **Balas jasa**
Ini merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya

administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

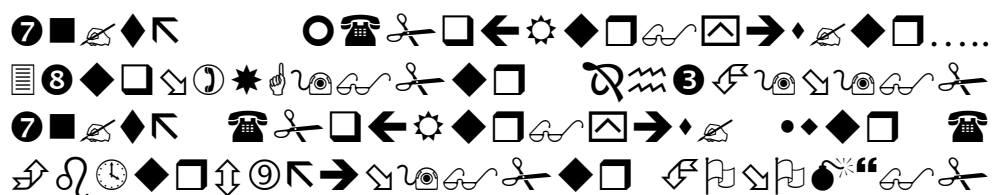
Thomas Suyatno, dkk (2007:14) berpendapat bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit, adalah :

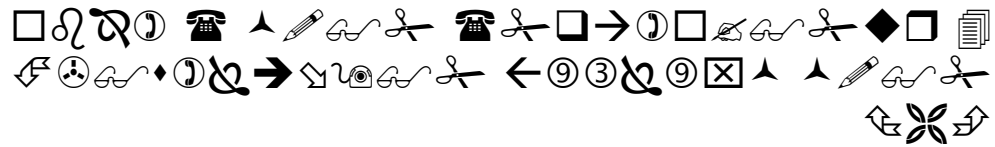
- a. Mencari keuntungan
Dalam arti untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah
Yakni membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembang dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah
Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh bank adalah :
 - 1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank,
 - 2) Membuka kesempatan kerja,
 - 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa,
 - 4) Menghemat devisa negara,
 - 5) Meningkatkan devisa negara.

Disamping tujuan diatas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna
Dengan adanya kredit, dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan akan disalurkan dan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

Dalam agama islam saling tolong menolong sangatlah dianjurkan apabila disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dalam hal kebaikan. Demikian halnya dalam memberikan pinjaman atau utang kepada orang yang sangat membutuhkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :





Artinya :

“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)

Dilihat dari tujuan penyaluran kredit dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya kredit ini bertujuan untuk membantu debitur yang mebutuhkan, baik untuk mengembangkan usaha maupun dalam hal untuk keperluan lainnya, dan bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

4. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank kepada masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya :

a. Dilihat dari segi kegunaannya

1) Kredit investasi

Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit ini merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit ini biasanya digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh debitur. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan nilai dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan ini biasanya digunakan untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan biasanya digunakan untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit ini merupakan kredit yang masa pengembaliannya panjang. Kredit ini mempunyai jangka waktu pengembaliannya di atas 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminannya

1) Kredit dengan jaminan

Ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, dimana jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang disalurkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. Dan biasanya kredit ini diberikan kepada perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Selain itu, kredit tanpa jaminan ini dapat pula diberikan dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian, yang merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat, dimana sector usaha pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal kredit ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, sedangkan untuk jangka panjangnya seperti misalnya untuk peternakan kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, dimana jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, timah, dan sebagainya.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, kredit ini diberikan kepada professional seperti dosen, dokter, akuntan dan lain-lain.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan, maka bank harus benar-benar merasa yakin bahwa kredit yang disalurkan tersebut akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut dicairkan. Penilaian

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui analisis 5C, yaitu : penilaian terhadap *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collecteral* (Agunan), dan *Condition* (Kondisi ekonomi), (Warman Djohan:2006: 106)

a. *Character*

Ini merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya, dimana kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan begitu pada akhirnya kan terlihat kemampuannya untuk mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang.

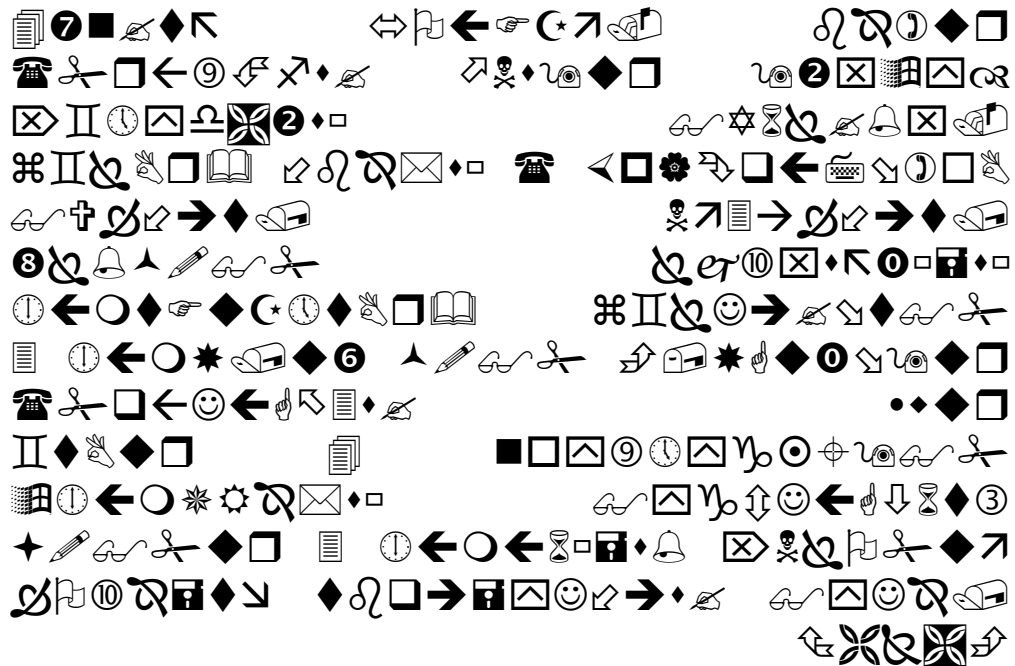
d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan tersebut juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Dalam hal hutang piutang, islam juga menyarankan agar orang yang melakukan pinjaman menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman. Hal ini dilakukan apabila kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman :



Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah:283)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jaminan terhadap pinjaman merupakan sesuatu yang sangat penting. Ini bertujuan agar apabila sewaktu-waktu pihak yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan yang diserahkannya itu dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman untuk melunasi hutang tersebut.

Dikemukakan oleh Rivae dan Andria (2006:91) diterangkan bahwa kriteria penilaian yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, selain dilakukan dengan analisis 5 C juga harus dilakukan dengan analisis 7 P, diantaranya :

- a. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*
Yakni mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
- d. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
- e. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga apabila salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh sektor usahanya yang lain.
- f. *Profitability*
Ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dimaksud dapat berupa barang jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

6. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Kasmir (2001:110) secara umum prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan atau disyaratkan oleh bank.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan.
- c. Wawancara I
Ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- d. *On the spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil dari *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.
- e. Wawancara II

Ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

- f. **Keputusan kredit**
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit merupakan keputusan *team*. Dan apabila kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
- g. **Penandatanganan kad kredit/perjanjian lainnya**
Ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
- h. **Realisasi kredit**
Kegiatan ini merupakan pemberian kredit setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. **Penyaluran atau penarikan dana**
Kegiatan ini adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.

7. Teknik Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Penyelesaian kredit adalah suatu penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang diragukan dan macet. Jika bank memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, tentunya tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur.

Kemungkinan macetnya kredit yang disalurkan oleh bank dapat disebabkan oleh 2 unsur, yaitu :

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak nasabah

Dalam hal ini, kemacetan kredit dapat terjadi akibat 2 hal, yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank atau dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, sehingga kredit yang diberikan menjadi macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu dikarenakan berbagai faktor penghambat yang tidak diingini, seperti terjadinya musibah sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Menurut Muchdarsyah (2004:115) dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit yang dinyatakan macet oleh bank dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Rescheduling*

Dalam hal ini, penyelamatan yang dapat dilakukan adalah berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.

b. *Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti :

- 1) Kapitalisasi bunga

Yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk jangka waktu tertentu tidak perlu membayar bunga.

- 2) Penundaan pembayaran bunga

Dalam hal ini bunga tetap dihitung, akan tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan, dan atas bunga yang terutang tidak dikenakan bunga. Namun demikian, pokok pinjamannya tetap harus dibayar.

- 3) Penurunan suku bunga

Hal ini dimaksudkan agar dengan penurunan suku bunga ini akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Hal ini dilakukan apabila hasil operasi dari usaha nasabah memang menunjukkan *surplus*/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.

- 4) Pembebasan bunga

Keringanan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa nasabah dinilai memang sudah tidak sanggup lagi membayar bunga, karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break event*). Akan tetapi nasabah masih harus diwajibkan untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap situasi dan kondisi permodalan. Tindakan yang dapat diambil antara lain:

- 1) Dengan menambahkan jumlah kredit

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

- 2) Dengan menambahkan *equity*

Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

- (a) Tambahan modal dari pihak bank yang dapat berupa tambahan uang tunai,

- (b) Tambahan dari pemilik, yang apabila perusahaannya berupa Perseroan Terbatas (PT), maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

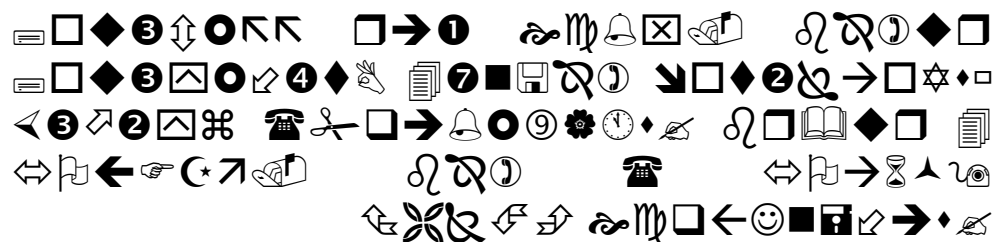
d. Kombinasi

Ini merupakan kombinasi dari ketiga cara penyelamatan di atas.

e. Penyitaan jaminan

Hal ini dilakukan karena merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

Selain dari teori di atas, dalam islam juga telah dibahas mengenai penangguhan dalam pembayaran hutang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :



Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:280)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang yang berhutang mendapat kesulitan dalam melakukan pembayaran hutangnya, maka sebaiknya si pemberi hutang hendaknya memberikan keringanan yang berupa penangguhan kepada yang berhutang dalam melakukan pembayaran hutangnya tersebut,

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdirinya Bank Riau diawali dengan Bank Pembangunan Daerah Riau yang merupakan milik Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau KDH. Tk. I Riau No. 51/IV/1966 tanggal 1 April 1966 yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1992 jo. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pebankan.

Berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No. 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Mohammad Dahar Umar, SH. No. 36 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan dengan Surat Keputusan No. C-09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Bank Riau ini mempunyai Visi “sebagai perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.” Sedangkan Misinya adalah “sebagai Bank sehat, elit, dan merakyat. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai pengelola dana Pemerintah, sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan menengah.”

Selanjutnya dalam menjalankan visi dan misinya serta memperluas kegiatan dan aktivitas pebankannya, Bank Riau membuka kantor Cabang diberbagai daerah baik dalam maupun luar Propinsi. Salah satunya adalah Cabang Pasar Pusat Pekanbaru. Sampai saat ini PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syariah, 29 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 2 Kantor Cabang Pembantu Syari'ah, 11 kantor Kas, serta 2 Payment Point yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

B. Struktur Organisasi

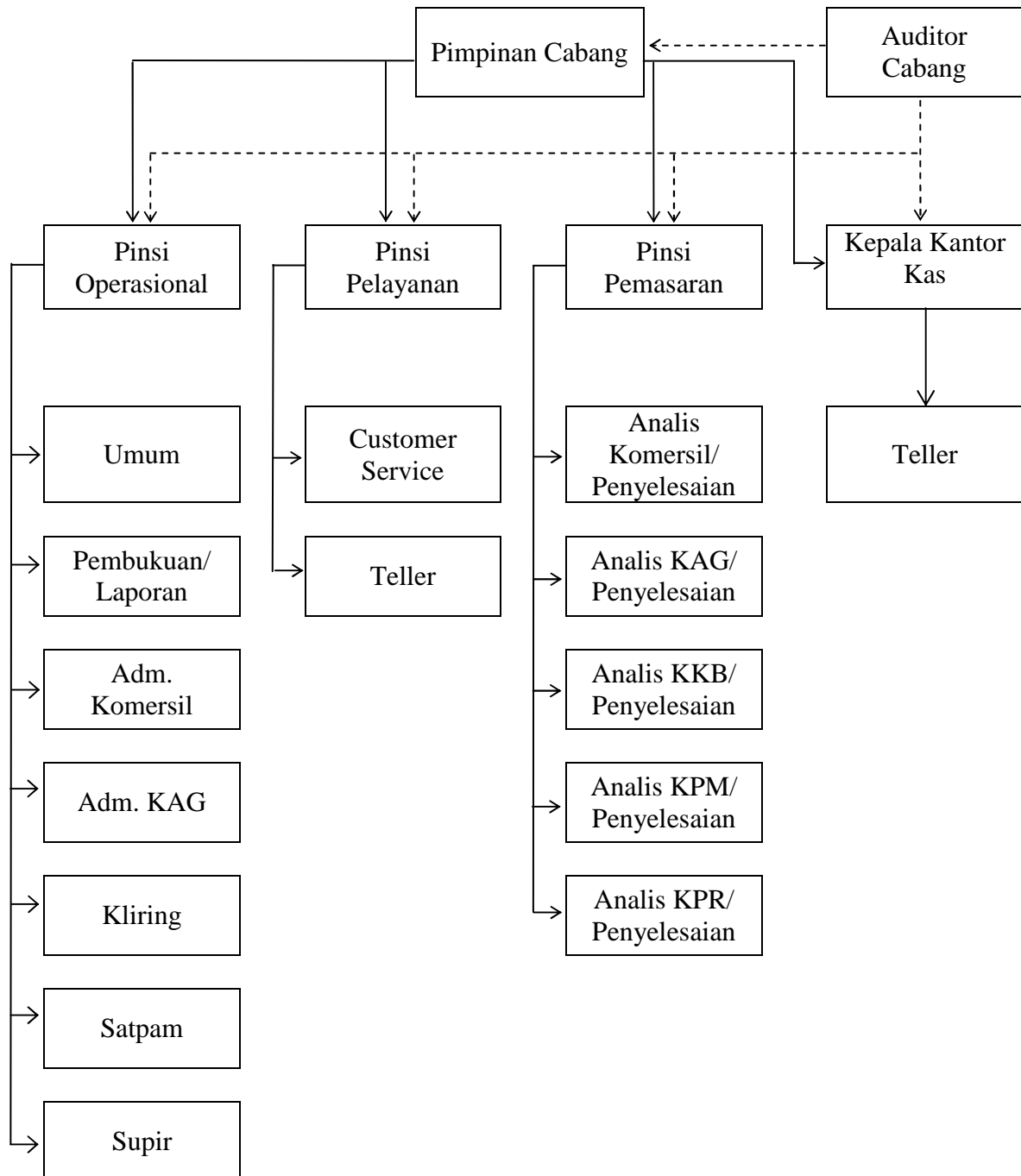
Setiap badan usaha yang didirikan mempunyai suatu tujuan, oleh karena itu diperlukan kemampuan pengelolaan organisasi yang baik dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak semata-mata tergantung kepada kemampuan seseorang. Untuk itu sangat diperlukan kerjasama yang menyeluruh diantara individu yang berada pada Bank Riau.

Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilibatkan kerangka pembagian tugas dari masing-masing bagian, serta keseluruhan dari fungsi-fungsinya yang saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu struktur organisasi dapat menunjukkan koordinasi dari tugas-tugas serta fungsi-fungsi dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara lancar dan efisien memungkinkan dilaksanakan pendelegasian wewenang dan dapat berlangsungnya komunikasi dengan lancar antara atasan dengan bawahan atau bagian yang satu dengan bagian lainnya.

Adapun struktur organisasi Bank Riau Cabang Pasar Pusat ditinjau dari sudut lalu lintas kekuasaan dan tanggungjawab serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi maka bentuk organisasi Bank Riau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III.1. Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar

Pusat Pekanbaru



Sumber : PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat

Dalam bagan struktur organisasi di atas tergambar bagaimana pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian kerja akan mudah untuk dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun uraian tugas masing-masing bagian yang terdapat pada bagan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Secara garis besar pekerjaan dari pimpinan cabang adalah terdiri dari beberapa tugas, diantaranya :

- a. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan aktifitas kantor cabang sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan kantor pusat.
- a. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan profitabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan dan kerjasama dengan relasi serta nasabah.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada staf dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara efektif dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.

- b. Meneliti dan memantau seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa nasabah bank dilayani secara baik dan bahwa pegawai-pegawai bekerja secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan target usaha jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan sejalan dengan kebijakan kantor pusat.
- d. Meneliti laporan pendapatan dan biaya setiap bulan, triwulan dan tahunan dalam rangka pengendalian biaya.
- e. Mengatur penempatan dan rotasi berkala terhadap pelaksanaan sesuai dengan *volume* pekerjaan agar semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- f. Mengarahkan para petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan *password* yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Memantau pengelola dan administrasi kas daerah.

Selain itu, pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang pimpinan cabang adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan cabang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada direksi.
- b. Sesuai dengan wewenangnya mewakili bank dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas kantor cabang.
- c. Dalam hal pimpinan cabang tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dan

diambil alih oleh wakil pimpinan cabang yang dalam hal ini adalah masing-masing pimpinan seksi.

2. Pimpinan Seksi Operasional

Secara garis besar pekerjaan pimpinan seksi operasional ini sendiri adalah :

- a. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan kredit, transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian dan pengelolaan barang/aktiva tetap dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan kantor cabang.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas pokok pimpinan seksi operasional adalah :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama-sama dengan wakil pimpinan cabang yang dalam hal ini adalah masing-masing pimpinan seksi.
- b. Melakukan vertikasi data dan transaksi sebelum dilakukan proses lebih lanjut.
- c. Mengarahkan para pejabat/petugas yang diberi wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan *password* yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Memelihara dan menjaga kelancaran komunikasi dengan nasabah dan bank-bank koresponden.

- e. Mengawasi semua aktifitas dalam hubungan administrasi dan dokumentasi kredit.
- f. Memberi saran/pendapat pada pimpinan cabang dan seksi pemasaran mengenai permasalahan yang menyangkut perkreditan.
- g. Membuat/menyusun, mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan penghimpunan dana dan bekerjasama dengan unit kerja terbaik.

Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang :

- a. Pimpinan seksi operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal pimpinan seksi operasional berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah satu pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang.

3. Pimpinan Seksi Pelayanan

Garis besar pekerjaan adalah :

- a. Mengusahakan agar tercipta mutu pelayanan yang baik bagi nasabah, sehingga tercapai tingkat efisiensi dan efektifitas pekerjaan guna mencapai laba yang optimal.
- b. Melakukan pengendalian kas/likuiditas perangkat pengamanannya guna menghindari berbagai macam resiko pengelolaan kas.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas pokok pimpinan seksi pelayanan adalah :

- a. Mengendalikan aktivitas pelayanan nasabah di *front office* dan mengupayakan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien sesuai prosedur yang ditetapkan kantor pusat.
- b. Memberikan pelayanan yang prima sehingga dapat membina, meningkatkan hubungan serta menarik minat nasabah agar lebih banyak mempergunakan produk dan jasa bank.
- c. Mengusahakan kelengkapan dokumentasi dan menyetujui pembukuan rekening giro, tabungan dan deposito.
- d. Melayani pembukaan rekening baru berikut kelengkapan administrasi dan dokumentasi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.
- e. Menerbitkan surat keterangan bank atas permohonan nasabah.
- f. Memantau rekening tidak aktif dan melakukan penutupan rekening tabungan.
- g. Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai maupun non tunai yang dilaksanakan oleh teller.
- h. Mengambil keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan kartu contoh tanda tangan atau data lainnya yang menyangkut nasabah.

Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang pimpinan seksi pelayanan, diantaranya :

- a. Pimpinan seksi pelayanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

- b. Dalam hal pimpinan seksi pelayanan tidak berada di tempat atau berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh pimpinan cabang kecuali auditor cabang.

4. Pimpinan Seksi Pemasaran

Garis besar pekerjaan dari pimpinan seksi pemasaran ini adalah :

- a. Mencari nasabah dan memasarkan produk/jasa-jasa bank serta memperluas peluang aktivitas usaha di daerah kerja kantor cabang.
- b. Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisis permohonan kredit serta memantau rekening nasabah.
- c. Mengelola/menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
- d. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas-tugas pokoknya adalah :

- a. Memasarkan produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.
- b. Menghimpun/mengarahkan dana pihak ketiga.
- c. Memasarkan kredit kepada calon nasabah.
- d. Memantau pengelolaan dan administrasi kas daerah.
- e. Melakukan analisis terhadap permohonan kredit dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas yang dimohon.
- f. Memonitor perkembangan usaha nasabah khususnya yang berkaitan dengan penilaian kualitas fasilitas kredit nasabah yang bersangkutan.
- g. Membuat/menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pemasaran bekerjasama dengan unit kerja terkait.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang dari pimpinan seksi pemasaran antara lain :

- a. Pimpinan seksi pemasaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal pimpinan seksi pemasaran tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah seorang pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang kecuali auditor cabang.

5. Kepala Kantor Kas

Secara garis besar pekerjaan dari kepala kantor kas adalah terdiri dari beberapa tugas, diantaranya :

- a. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan aktifitas kantor kas sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan kantor cabang.
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang prima sehingga dapat membina, meningkatkan hubungan serta menarik minat nasabah agar lebih banyak mempergunakan produk dan jasa bank.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada teller dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua *teller* bekerja secara efektif

dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.

- b. Meneliti dan memantau kerja *teller* untuk memastikan bahwa nasabah bank dilayani secara baik.
- c. Melayani pembukaan rekening baru berikut kelengkapan administrasi dan dokumentasi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.
- d. Memantau rekening tidak aktif dan melakukan penutupan rekening tabungan.
- e. Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai maupun non tunai yang dilaksanakan oleh *teller*.
- f. Mengambil keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan kartu contoh tanda tangan atau data lainnya yang menyangkut nasabah.

Selain itu, pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang kepala kantor kas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala kantor kas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal kepala kantor kas tidak berada di tempat atau berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh pimpinan cabang kecuali auditor cabang.

6. Auditor Cabang

Garis besar pekerjaan auditor cabang ini adalah :

- a. Membantu direksi dalam usaha terlaksananya *internal control* atau pengawasan yang melekat terhadap pegawai dan aktivitas operasional sehingga tercapai tingkat efisiensi dan pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko kesalahan dan kegagalan kerja, baik di kantor cabang maupun di kantor pusat yang secara struktural menjadi tanggungjawab kantor cabang yaitu cabang pembantu, kantor kas, dan kantor lainnya.
- b. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dalam bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan tugas pokoknya adalah :

- a. Melakukan *cash opname* secara insidentil.
- b. Melakukan penelitian atas transaksi/*voucher* pembukuan dan *print out* data komputer/pembukuan yang berupa jurnal harian, neraca, rekening-rekening perantara, persekot dan sejenisnya.
- c. Meneliti kembali pemrosesan pemberian dan pengelolaan kredit/jaminan bank (termasuk pengecekan kelengkapan dokumen).
- d. Memantau hasil inventarisasi tahunan atas persediaan peraltan dan perabotan kantor.
- e. Memonitor penyelesaian klaim asuransi sebagaimana mestinya.
- f. Memantau rekening pinjaman yang mendapat fasilitas *overdraft*.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Selain tugas-tugas di atas, terdapat juga pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang dari auditor cabang, antara lain :

- a. Seksi pengawasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pimpinan divisi pengawasan.
- b. Dalam hal pimpinan seksi pengawasan tidak berada di tempat atau berhalangan melaksanakan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh pimpinan divisi pengawasan.

7. Pelaksana

Pelaksana disini terdiri dari karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi-pinsi yang ada dan mempunyai tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing, serta bertanggung jawab kepada pinsinya masing-masing.

C. Aktivitas Perusahaan

Bank Riau merupakan bank umum dimana menurut Undang-undang RI tahun 1998, yang dimaksud dengan bank umum adalah :

“Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kasmir (2003 : 23)

Sebagaimana bank yang lainnya, ada beberapa jenis produk dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank Riau kepada nasabah. Adapun produk-produk yang terdapat pada PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwasanya tujuan dari pendirian bank salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kemasyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk.

a. Tabungan.

Tabungan adalah suatu bentuk simpanan yang jangka waktu dan jumlahnya tidak ditentukan, dan waktu pengambilan bisa kapan saja, baik itu memakai ATM maupun slip penarikan langsung. Tabungan menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1) Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang memiliki kelebihan dan fleksibel dalam melakukan penarikan. Nasabah dapat menyimpan dengan setoran awal Rp. 50.000,- dengan saldo minimum Rp. 20.000,-

2) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Merupakan salah satu jenis tabungan yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Setoran awal sesuai ketentuan kantor cabang masing-masing daerah.

3) Simpanan Dhuha

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang merupakan tabungan haji. Simpanan Dhuha adalah produk tabungan baru dikeluarkan tetapi telah banyak diminati masyarakat. Nasabah dapat menyimpan dananya dengan setoran awal minimum Rp.350.000,-

b. Giro

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

c. Deposito

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan Bank.

2. Penyaluran Dana.

Adapun tujuan yang lainnya dari pendirian Bank Riau itu sendiri adalah menyalurkan dana pada masyarakat. Adapun penyaluran dana pada masyarakat adalah dalam bentuk kredit, jenis-jenis kreditnya antara lain:

a. Kredit Komersil

Kredit Komersil adalah kredit yang diperuntukkan bagi pedagang, petani, usaha jasa dan sebagainya yang ingin mengembangkan usahanya.

b. Kredit Mikro dan Kecil

Kredit mikro dan kecil ini adalah kredit yang diberikan pada pedagang, pengusaha kecil, dan sektor pertanian.

c. Kredit Konsumtif

Kredit ini diberikan bagi pegawai negeri yang membutuhkan dana tunai untuk kebutuhannya sehari-hari.

3. Jasa-Jasa Bank

Adapun jasa-jasa yang diberikan pada nasabah sama halnya dengan bank yang lainnya, seperti transaksi transfer uang, inkaso, bank garansi, referensi atau

dukungan bank, penerimaan PBB, penerimaan pembayaran telepon, pembayaran pensiun, fasilitas ATM, kartu kredit Bank Riau Visa dan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diawal, bahwa sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Struktur pengendalaian intern terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait. Dalam menganalisa struktur pengendalian intern yang ada di Bank Riau Cabang Pasar Pusat, pembahasan lebih difokuskan pada lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Di sini penulis menguraikan dan membahas tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dari tujuan sistem pengendalian intern, struktur organisasi dari lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, dengan melihat penerapan dan pelaksanaannya di Bank Riau Cabang Pasar Pusat, serta kemudian memberikan penilaian. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti bagaimana struktur pengendalian intern yang terjadi pada Bank Riau Cabang Pasar Pusat.

A. Tujuan Kepatuhan

Tujuan Kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas

pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

Dalam hal mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka hal ini berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Sesuai dengan standar Bank Indonesia, Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dalam memberikan keputusan apakah kredit layak diberikan atau tidak kepada calon debitur adalah dengan melakukan analisis 5 C seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu penilaian terhadap *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).

Dalam melakukan analisis terhadap *collateral* (agunan), Bank Riau juga harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia, yakni mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang berbunyi :

“Batas maksimum pemberian kredit adalah sebesar 80% (delapan puluh peratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan yang berupa tanah, bangunan dan rumah yang bersertifikat hak milik (SHM), dan sebesar 50% (lima puluh peratus) dari nilai pasar untuk agunan yang berupa kendaraan bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” (2009:www.bi.go.id).

Namun hasil temuan menunjukkan bahwa penyaluran kredit komersil yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Pasar Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di atas karena terdapat beberapa nasabah yang melakukan pinjaman dengan nilai agunan lebih kecil dibandingkan plafon kredit yang diberikan oleh bank. Khusus untuk penyaluran kredit komersil tersebut, pada tahun 2007 plafon kredit yang diberikan oleh Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru kepada PT. PRB adalah sebesar Rp. 1.400.000.000,- sedangkan nilai agunan untuk kredit tersebut hanya sebesar Rp. 1.187.120.000,-. Selain itu, pada tahun 2006 plafon kredit untuk PT. AMI adalah sebesar Rp. 3.435.000.000,-, sedangkan agunan yang dijamin oleh debitur ke bank adalah sebesar Rp. 2.711.000.000,-. Kemudian pada tahun 2005 dengan nilai agunan yang diserahkan oleh CV. AU sebesar Rp. 375.225.000,-, perusahaan tersebut dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan total plafon kredit sebesar Rp. 425.000.000,-.

Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak perbankan dalam hal ini Bank Riau belum sepenuhnya menjalankan dan mematuhi peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum seperti mana yang telah disebutkan di atas. Kondisi yang seperti ini dapat berpotensi merugikan bank apabila sewaktu-waktu terjadi kendala terhadap pelunasan kredit oleh nasabah, karena nilai agunan tidak mengcover plafon kredit yang diberikan bank tersebut.

Menurut Bank Indonesia Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, “Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif

dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian,” (2009:www.bi.go.id).

Berdasarkan pedoman standar yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa pengabaian ketentuan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap kinerja perbankan, dan akan menyebabkan gagalnya fungsi sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh manajemen bank itu sendiri. Ini dikarenakan pihak bank tidak sepenuhnya menjalankan salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern yakni “kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku”. Hal ini tentunya tidak mencerminkan suatu pengendalian yang efektif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di atas.

B. Aktivitas/Prosedur Pengendalian

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam hal untuk mengurangi resiko di atas, maka Bank Indonesia (Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum:2003) menyatakan bahwa “Bank harus meningkatkan efektifitas budaya resiko (*risk culture*) atau disebut juga dengan tujuan budaya resiko. Tujuan Budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.” (2009:www.bi.go.id).

Aktivitas/prosedur pengendalian bertujuan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Salah satu langkah awal untuk mendeteksi apakah kredit yang disalurkan oleh bank tidak menghadapi kendala dalam pelunasannya, maka bank harus membuat laporan yang akurat mengenai perkembangan kredit yakni dengan melakukan pemantauan ke lapangan oleh bagian analis kredit. Laporan yang akurat mengenai perkembangan kredit tersebut tentunya sangat diperlukan dan dapat dijadikan informasi yang sangat bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak-pihak perbankan.

Dalam hal pembuatan laporan perkembangan kredit yang disalurkan, bagian analis kredit hanya membuat berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, yakni apabila debitur membayar kreditnya tepat pada tanggal jatuh tempo maka bagian analis membuat laporan bahwa kredit yang disalurkan tersebut tidak bermasalah tanpa melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan, dengan alasan bahwa apabila pemantauan secara langsung ke lapangan tidak dilakukan, maka biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh bank dapat diminimalkan.

Keterangan dari bagaian analis di atas tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara secara langsung ke bagian analis kredit Bank Riau, yakni dengan pertanyaan : “Setelah kredit dicairkan, bank tentunya harus membuat laporan perkembangan kredit. Bagaimana langkah-langkah Bank Riau ini dalam menyiapkan laporan tersebut ?”

Dari keterangan di atas tersebut, hal ini tentu menyebabkan tidak adanya laporan hasil pemantauan (*monitoring*) yang benar-benar akurat yang dibuat oleh

bagian analis kredit dan tentunya Bank Riau juga tidak segera mengetahui perkembangan kredit yang diterima oleh debitur secara akurat pula, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat bank juga tidak benar-benar bersumber dari informasi lapangan. Karena seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa laporan yang akurat mengenai perkembangan kredit yakni dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan (*on the spot*) oleh bagian analis kredit tentunya sangat diperlukan dan dapat dijadikan informasi yang sangat bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak-pihak perbankan.

Mengenai laporan yang benar dan dapat dipercaya, sebelumnya juga telah disinggung mengenai pengertian sistem pengendalian intern bank menurut Bank Indonesia yakni “Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), yang salah satu kegunaannya adalah untuk menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat”.

Laporan yang akurat tersebut sudah tentu sangat berkaitan pula dengan salah satu dari tujuan sistem pengendalian bank, yakni tujuan informasi. Dalam Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa :

“Tujuan Informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

(2009:www.bi.go.id)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank untuk menjamin tersedianya suatu pelaporan yang dapat dipercaya dan dapat pula dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk itu, suatu sistem pengendalian intern yang efektif tersebut mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasarannya, yang dalam hal ini adalah memantau perkembangan kredit yang disalurkan agar tidak terjadinya penunggakan dalam pelunasan kredit tersebut.

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk mewujudkan pencapaian dari salah satu tujuan perusahaan yakni untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat terhadap perkembangan kredit tersebut, Bank Riau dalam hal ini tentunya harus membuat laporan perkembangan kredit tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan bukan hanya sekedar membuat kesimpulan dari pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjamannya.

C. Struktur Organisasi

Bank Indonesia (Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum:2003) “Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank. antara lain:

1. Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus Bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi
2. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank;

3. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional Bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas *risk exposure* dan kinerja Bank;
 4. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas *risk exposure* dan penerapan tindakan perbaikan;
 5. Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
 6. Kurangnya komitmen manajemen Bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank.
- (2009: www.bi.go.id)

Jika diperhatikan pada point 3 di atas, maka kegagalan fungsi pengendalian intern bank dapat disebabkan karena tidak adanya pemisahan fungsi dan tanggungjawab yang dilakukan oleh pegawai bank. Pemisahan fungsi dan tanggungjawab pada suatu organisasi dapat bertujuan untuk memaksimalkan kinerja para pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Pada sebuah organisasi, pemisahan fungsi tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi. Struktur tersebut dibentuk dengan tujuan agar posisi setiap anggota organisasi dapat dipertanggungjawabkan, mengenai hak maupun kewajibannya. Struktur dibentuk agar organisasi berjalan rapi, karena terdapat struktur komando, siapa yang berwenang dan siapa yang diberi wewenang.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Erat kaitannya dengan lingkungan pengendalian, struktur organisasi merupakan satuan usaha yang bertujuan untuk membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada. Selain itu, kualitas individu juga sangat penting dan berarti bagi suatu organisasi. Struktur organisasi tak banyak artinya bila tidak ditunjang oleh kualitas individu anggota-anggotanya, karena kualitas proses dalam organisasipun sangat bergantung pada kualitas individu.

Dalam hal untuk melakukan penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah, seharusnya perlu suatu bagian yang khusus dan mempunyai keahlian yang khusus pula untuk melakukan penagihan kredit bermasalah tersebut. Bagian ini tentunya juga harus mempunyai kedudukan yang jelas dan tergambar pada struktur organisasi. Namun pada struktur organisasi Bank Riau (lihat lampiran) tidak terdapat bagian khusus yang menangani penagihan kredit (*debt collector*), akan tetapi yang melakukan penagihan tersebut adalah bagian analis kredit. Sebagaimana yang diketahui, bahwa analis kredit pada suatu bank berfungsi untuk menentukan dan menganalisa kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dalam hal apakah permohoan kredit tersebut layak diterima atau ditolak, dan tugas analis kredit bukan untuk melakukan penagihan terhadap kredit yang bermasalah. Dengan demikian, dapat kita perhatikan dengan jelas bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya rangkap jabatan/pekerjaan yang dilakukan oleh bagian analis kredit, sehingga dapat menyebabkan kinerja pegawai tidak maksimal seperti yang diharapkan.

Sistem pengendalian intern yang efektif juga sangat ditentukan dalam suatu pemisahan fungsi pekerjaan yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan

di atas. Apabila adanya suatu pemisahan fungsi yang jelas, maka tujuan efektifitas perusahaan juga akan dengan mudah dapat dicapai karena tidak ada lagi yang namanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai dan pegawai juga dapat lebih fokus melakukan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang mungkin dapat diterima dan berguna bagi perbaikan suatu pengendalian intern bank khususnya dalam hal pengendalian intern terhadap kredit.

A. Kesimpulan

1. Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit, Bank Indonesia menetapkan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur apabila disertai dengan barang agunan sebagai penjamin dari hutangnya, maka plafon kredit yang dikeluarkan oleh bank terkait harus lebih kecil dari nilai agunan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kerugian bank apabila kredit yang disalurkan tidak dapat dilunasi debitur. Namun dalam hal penyaluran kredit yang dilakukan Bank Riau Cabang Pasar Pusat, khususnya terhadap kredit komersil, ada beberapa kasus yang terjadi dimana plafon kredit yang disalurkan kepada beberapa debitur nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai agunan.
2. Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan laporan perkembangan kredit yang dibuat oleh bagian analis kredit Bank Riau adalah berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, yakni apabila debitur

membayar kreditnya tepat pada tanggal jatuh tempo maka bagian analis membuat laporan bahwa kredit yang disalurkan tersebut tidak bermasalah tanpa melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan.

3. Dalam hal penanganan terhadap kredit bermasalah, Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru tidak mempunyai bagian khusus yang menangani penagihan terhadap kredit macet, tetapi yang melakukan penagihan terhadap kredit macet tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab bagian analis kredit. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya rangkap jabatan/pekerjaan yang dilakukan oleh bagian analis kredit, sehingga dapat menyebabkan kinerja pegawai tidak maksimal seperti yang diharapkan.

B. Saran

1. Bank Riau khususnya Kantor Cabang Pasar Pusat disarankan untuk tetap komitmen terhadap peraturan dan ketentuan yang ada tanpa melibatkan hubungan emosional dengan calon debitur dalam mengambil suatu keputusan penyaluran kredit. Hal ini disebabkan apabila dalam penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka resiko yang bakal muncul dapat berpotensi merugikan bank. Untuk itu, pimpinan tentunya harus menjadi panutan bagi seluruh pegawai untuk memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat. Selain itu, pimpinan juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai-pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena untuk menjadikan suatu sistem pengendalian intern itu

efektif, setiap pejabat dan pegawai bank wajib memahami dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

2. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien. Dalam hal pendeteksian secara dini terhadap resiko kredit, perlu adanya suatu laporan perkembangan kredit yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Untuk itu, Bank Riau dalam hal ini tentunya harus membuat laporan perkembangan kredit tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan bukan hanya sekedar membuat kesimpulan dari pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjamannya.
3. Sistem pengendalian intern yang efektif juga sangat ditentukan dalam suatu pemisahan fungsi pekerjaan yang jelas dan tergambar pada struktur organisasi. Bank Riau khususnya pada Kantor Cabang Pasar Pusat sebaiknya membentuk dan menempatkan dengan jelas pada struktur organisasi suatu bagian khusus yang menangani penagihan terhadap kredit bermasalah terutama terhadap kredit macet. Apabila tugas dan tanggungjawab penagihan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada bagian analis kredit, maka besar kemungkinan banyak pekerjaan pokok yang seharusnya dilakukan oleh bagian analis kredit ini menjadi tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukirno, 2000, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik, Edisi ke dua, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Baridwan, Zaki, 1998, Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 2, Tentang Tolong Menolong
- _____, Surat Al-Baqarah ayat 280, Tentang Penangguhan Piutang
- _____, Surat Al-Baqarah ayat 283, Tentang Perjanjian Utang Piutang
- Bank Indonesia, 2003, Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, www.bi.go.id
- _____, 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, www.bi.go.id
- Djohan, Warman, 2000, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita, 2001, Analisis Kredit dilengkapi Telaah Kasus, Pioner Jaya, Bandung
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta
- Jusuf, Amir Abadi, 2003, Auditing Pendekatan Terpadu, Salemba Empat, Jakarta
- Kasmir, 2003, Manajemen Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

_____, 2001, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kisdarto, 2002, *Menuju SDM Berdaya*, Rajawalipers, Jakarta

Muchdarsyah, 2004, Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Bandung

Mulyadi dan Kanaka Puradireja, 2001, Auditing, Edisi Kelima, Salemba Empat

Munawir, 1999, Auditing Modern, Edisi Keempat, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Suyatno, Thomas, dkk, 2007, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, PT. Gramedia Utama

Sugiarto, 2002, Pengantar Akuntansi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta

Triandu, Sigit dan Totok Budisantoso, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta

Prawirosentono, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Liberty, Yogyakarta

Veithzal, Rivae dan Andria Permata Veithzal, 2006, Credit Management Handbook, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru
- Lampiran 2. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru
- Lampiran 3. Laporan Penyaluran Kredit
- Lampiran 4. Neraca Singkat Cabang Pasar Pusat Tahun 2007
- Lampiran 5. Laba/Rugi Singkat Cabang Pasar Pusat Tahun 2007
- Lampiran 6. Daftar Kredit yang Disalurkan Tahun 2007
- Lampiran 7. Daftar Kualitas Kredit yang Disalurkan Tahun 2007
- Lampiran 8. Daftar Rekapitulasi Kualitas Kredit yang Disalurkan Tahun 2007
- Lampiran 9. Neraca Singkat Cabang Pasar Pusat Tahun 2006
- Lampiran 10. Laba/Rugi Singkat Cabang Pasar Pusat Tahun 2006
- Lampiran 11. Daftar Kredit yang Disalurkan Tahun 2006
- Lampiran 12. Daftar Kualitas Kredit yang Disalurkan Tahun 2006
- Lampiran 13. Daftar Rekapitulasi Kualitas Kredit yang Disalurkan Tahun 2006

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1. Daftar Kualitas Kredit PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat	5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kantor Cabang Pasar Pusat Pekanbaru	45